

Analisis Kebijakan Penyediaan Kapal Tangkap Ikan Nelayan Kabupaten Bintan (Studi di Desa Mantang Lama)

Wahjoe Pangestoeti¹
wpangestoeti@yahoo.com
Mahadiansar²
mahadiansar@student.ub.ac.id
Aspariyana³
riyanaaspa@gmail.com

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

²Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

³Program Studi Sosiologi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Analisis kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh pemerintahan desa mantang lama merupakan langkah strategis sebagai upaya dalam persiapan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nelayan di daerah pesisir yang terdapat di kabupaten bintan, provinsi kepulauan riau. Tujuan penelitian ini adalah melihat formulasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes, lalu peneliti ingin mengkaji; 1) Kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan desa mantang lama, 2) Kesepakatan bersama antara pemerintah desa melalui BUMDes dan nelayan setelah kapal tangkap ikan beroperasi sebagai tahap pertama. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil menunjukkan kebijakan yang dibuat semata-mata untuk meningkatkan perekonomian nelayan dan ingin memutuskan rantai perbudakan (tauke kapal tangkap ikan) serta megubah fikiran nelayan pada umumnya hanya tergantung dari orang di luar desa mantang. Kebijakan pemerintah desa mantang lama yang dibuat melihat nelayan desa mantang memiliki potensi besar agar bisa mandiri dan kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam kesehariannya bekerja dari darat menjadi bekerja di laut dari sektor kelautan dan perikanan melalui profesi sebagai tuan rumah nelayan tangkap ikan.

Kata Kunci: Kebijakan, BUMDesa, Nelayan.

ABSTRACT

Analysis of providing fishing boat policy through Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) from village government of Mantang Lama is a strategic step as the effort in preparing economic development and the prosperity of fisherman in coastal area, Bintan Regency, Riau Islands Province. The purpose of this research is to look at the policy formulation that has been done by village government through BUMDes. Then, the researcher wants to study; 1) providing fishing boat policy for fisherman in Mantang Lama, 2) the agreement between village government and the fisherman after the boats operate as the first phase. The research method that is used is qualitative research then will be analyzed descriptively. The result shows that the policy was created solely to develop the fisherman economy, cut off the chain of slavery (fishing boat tauke), and change the fisherman's mind who usually just rely on people outside of Mantang village. The village government policy of Mantang Lama was created by seeing the great potential of fisherman in Mantang village to be independent and be able in creating a new job demand for the society in their daily life who usually work at land become work at sea in marine and fisheries sector as the housefather of fisherman.

Keywords: Policy, BUMDesa, Fisherman

PENDAHULUAN

Desa pada umumnya merupakan kondisi sosial didalam daerah yang memiliki serba terbatas. Dikatakan sebuah desa ialah memiliki penduduk kurang dari 2500 penduduk di sebuah wilayah. Desa Mantang memiliki karakter *The Arranged Isolated Farm* yaitu memiliki perumahan yang berdekatan sungai ataupun pantai yang berada di daerah pulau-pulau kecil, memiliki karakter yaitu (1) Mempunyai aktivitas kehidupan hidup yang saling kenal lama mengenal antar ribuan jiwa (2) Ada pertalian perasaan tentang kesukuan/adat istiadat terhadap kebiasaan yang sama dan (3) Cara berusaha yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan yang lainnya bersifat kebetulan Landis (1936).

Orientasi BUMDes tidak hanya pada memperoleh keuntungan keuangan, melainkan juga menudukung peningkatan kesejahteraan desa. Sumber pendanaan BUMDes di bantu oleh pemerintahan desa sesuai dengan karakteristik di wilayahnya. Pemerintah memberikan dorongan hibah atau akses pemodaln baik materil muapun non materil, melakukan teknis pendampingan ke pasar dengan tujuan mengelola sumberdaya alam yang ada di desa, desa menyimpan potensi sumber daya alam cukup besar, kawasan perdesaan juga tersedia sumber daya manusia yang potensial untuk dimanfaatkan dan semua potensi ini harus menjadi potensi yang pengelolaannya harus tetap diprioritaskan, Moeljadi (2017:5-7)

Dari beberapa hasil penelitian oleh Ramadana, Ribawanto & Suwondo (2013) menunjukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan bahwa

keberadaan BUMDes keberadaannya tidak membantu dalam pemasukan pendapatan desa. Kemudian Ma (2013) salah satu artikelnya seharusnya tujuan utama sebuah desa ialah upaya pengretasan kemiskinan di desa. Desa juga di tuntutan untuk mewujudkan desa yang mandiri melalui BUMDes yang dikelola secara baik dan transparan, (Sidik, 2015 & Ridlwan, 2014)

Berbicara kesejahteraan masyarakat di Desa merupakan titik fokus peneliti dengan mengambil studi kasus di Desa kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil yaitu Desa Mantang Lama yang merupakan Desa di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Desa Mantang Lama terbilang Desa baru dalam pembentukannya, inovasi serta kebijakan yang di lakukan pemerintahan desa yaitu menitik beratkan kepada BUMDes Mantang Lama. BUMDes yang sudah berjalan 3 Tahun telah menghasilkan usaha-usaha baru bagi masyarakat mantang lama, kemudian melihat dari perefektif itu Pemerintahan Desa Mantang Lama melalui BUMDes mengalokasikan anggaran baru untuk penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan Desa Mantang Lama. Setelah peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan warga setempat, letak permasalahan yang peneliti jumpa ialah masih terdapat banyak nelayan yang masih tidak mandiri atau ketergantungan sama orang yang bukan asli daerah desa mantang lama atau biasa di sebut mempunyai tauke sebelum ikan itu di distribusikan ke pasar-pasar.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tauke adalah sebagai penguasa pekerjaan atau kepala pekerja. Usman (1998) mendefinisikan tauke merupakan seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi dan posisi sosial yang

lebih tinggi memiliki kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh. Hal ini yang menjadi masalah serius bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan yang masih terjajah dengan tidak memberikan kesejahteraan yang layak. Berbeda dengan Marbun, Kusai, & Zulkarnain (2018) menyatakan dengan pendekatan strategi sosial, tauke memiliki peran yaitu mempunyai wewenang seperti bantuan konsumsi, bantuan alat tangkap, proses pinjaman yang mudah. Hubungan yang bersifat kekeluargaan yang terjalin antara tauke dengan nelayan sedangkan pendekatan strategi ekonomi tauke yaitu pola sewa atau bagi hasil, membuka usaha sampingan tauke dan manajemen kredit tauke

Supriyanto, Adiputra, & Nazaki, (2015:2) melihat dari sisi lain, harus adanya pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui program-program desa yang dapat meningkatkan untuk menghasilkan nilai produksi. Menurut Rahim, Ramli, & Hastuti (2014:54) pendapatan nelayan pada umumnya merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Untuk pendapatan usaha tangkap nelayan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya penangkapan yang benar-benar dikeluarkan oleh nelayan pompong maupun sebagai nelayan bekerja untuk tauke yang pada saat musim penangkapan di dapatkan sekali melaut. Selain itu penyediaan biaya juga di tentukan melaut-tidaknya nelayan untuk melakukan penangkapan sehingga berdampak pada penghasilan dari tangkapan tersebut.

Dengan biaya penangkapan yang besar juga belum bisa memberikan jaminan kepastian nelayan akan

memperoleh hasil tangkapan yang banyak karena dipengaruhi oleh musim.

Pilihan peneliti terhadap pendekatan studi kasus dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh dua hal. *Pertama*, kasus pemanfaatan penyediaan kapal tangkap ikan oleh nelayan di daerah adalah fenomena kontemporer di era desentralisasi. Kasus ini menarik dan mungkin saja jarang ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya di daerah-daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Kedua*, Kabupaten Bintan sangat *concern* dalam membantu masyarakat miskin. Selain kebijakan yang dibuat, kebijakan dan masalah ataupun kendala kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan di Kabupaten Bintan dapat diungkap secara komprehensif, maka peneliti juga melakukan analisis atas kebijakan bagi kesejahteraan nelayan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mantang Lama khususnya. Dari sini juga dapat diketahui bahwa jenis studi kasus yang dipilih adalah studi kasus intrinsik karena peneliti ingin memahami secara mendalam kasus kebijakan kapal tangkap ikan bagi nelayan dan kendala kebijakan dari Pemerintahan Desa Mantang Lama melalui BUMDes. Pemerintah desa mantang lama pada umumnya telah mempunyai kebijakan yang strategi dalam memberdayakan kesejahteraan sosial melalui penyediaan kapal tangkap ikan yang lebih layak dan bisa mendongkrak perekonomian bagi masyarakat pesisir, tidak terlepas dari itu mengaju pada Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendesa No 4 Tahun 2015.

Setiawan (2017) menjelaskan dalam bukunya salah faktornya juga ialah nelayan pada umumnya di beberapa studi menunjukkan adanya faktor budaya

kemalasan karena dalam sehari mereka berpenghasilan tinggi dan tidak diatur dalam manajemen keuangan, hal ini sudah menjadi lumrah secara ilmiah. Selanjutnya hasil penelitian dari Susanto, et.al (2018) menyimpulkan garis kemiskinan nelayan di desa mantang lama sangat memperhatikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan informasi dari Kepala Desa akan membuat kebijakan dengan memberikan bantuan melalui BUMDes sebuah Kapal Penangkap Ikan untuk nelayan Desa Mantang sebanyak 5 Unit. Adapun Peneliti memberi judul “*Analisis Kebijakan Penyediaan Kapal Tangkap Ikan Nelayan Kabupaten Bintan; Studi Desa Mantang Lama*”

LANDASAN TEORI

Analisis kebijakan publik adalah kajian ilmu terapan yang mempunyai tujuan memberikan rekomendasi kepada *public policy maker* dalam rangka memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah kebijakan publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Analisis kebijakan bukanlah sebuah keputusan, sebagaimana dikemukakan oleh Weimer & Vining (2011:1) *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah dan juga berbagai

alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Salah satu alat bantu analisis kebijakan publik yang sangat bermanfaat adalah analisis *trade-off* dengan pertimbangan bahwa kebijakan publik terkait dengan kepentingan banyak stakeholders. Menurut Crissman, et.al (1998) Analisis *Trade-off* sebagai alat bantu pengambilan keputusan sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami konflik penggunaan sumber daya dan keinginan *stakeholders* (melibatkan kepentingan kebijakan) dalam pengelolaan sumber daya tersebut. *Stakeholders* akan di libatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan dan menentukan prioritas dalam pengelolaan. Penerapan *trade-off* dapat dilakukan pada berbagai bidang sesuai dengan studi kasus yaitu perikanan dan kelautan, sehingga ketika analisis kebijakan publik diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang menyangkut banyak *stakeholders* maka penggunaan *trade-off* akan sangat membantu.

Policy analysis is evaluable, because it can help a decision maker by providing information through research and analysis, isolating and clarifying issues, revealing inconsistencies in aims, and effort, generating new alternative and suggesting ways of translating ideas into feasible andrealizable policies. Its major contribution may be to yield insight particularly with regard to the dominance and sensitivity of the parameters. It is no more than adjunct, although a powerful one, to the judgment, intuition, and experience of decision makers (Quade, 1982:11)

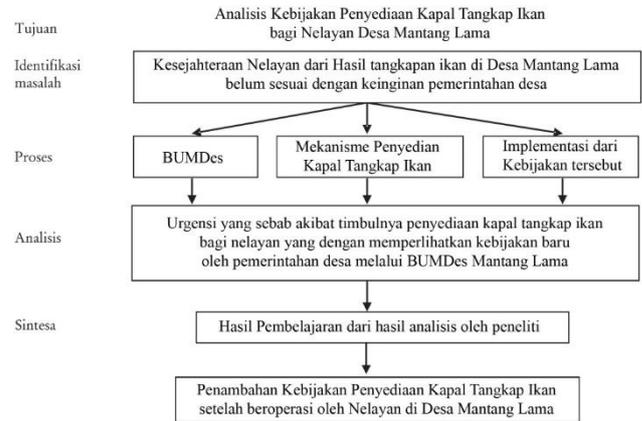
Kismartini (2010:404) menyatakan analisis kebijakan sangat penting karena

bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidak cocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide ke dalam kebijakan mudah diwujudkan dan direalisasikan.

Roe (1994) munculnya kebijakan merupakan cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah oleh suatu kelompok ataupun instansi dngan berupa tindakan, kemudian yang mengarah suatu tujuan lingkungan tertentu dengan mencari peluang-peluang dengan mewujudkan sasaran apa yang diinginkan, Friedrich (1940). Kemudian terlepas dari kebijakan tersebut menurut Dunn (2000:132) dalam perumusan kebijakan sebenarnya harus melihat dari pengembangan terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah sebuah dari rangkaian ataupun proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang akan dijalaninya, berikut ini analisis kebijakan mengandung prosedur sebagai berikut : (1) Perumusan masalah, menghasilkan informasi mengenai kondisikondisi yang menimbulkan masalah kebijakan; (2) Peramalan, proses menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan; (3) Rekomendasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah; (4) Pemantauan, menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan; dan (5) Evaluasi, yang mempunyai dan

menyediakan informasi mengenai nilai sebuah resiko untuk pengatasi masalah.

Gambar 2. Kerangka Berfikir Analisis Kebijakan



Sumber : *A Methodology for policy process analysis (Sprigate, Baginsky & Soussan, 2002)*

Kemudian Anderson, (2000:100) menyatakan perlu adanya pengesahan kebijakan sebagai upaya telah memiliki kesepakatan dan kesepakatan secara bersama terhadap prinsip serta diakui sesuai dengan ketentuan yang dapat di terima, proses pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) *Persuasion*, yaitu perbuatan meyakinkan orang lain tentang suatu fakta atau nilai kedudukan seseorang baik individu atau kelompok mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) *Bargaining*, yaitu sebuah upaya dimana kedua orang atau lebih pemegang kekuasaan yang mengatur setidaknya target mereka tidak sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang bisa diterima secara bersama tetapi tidak sesuai pandangan mereka. *Bargaining* juga membangun perjanjian (*negotiation*); saling memberi dan menerima (*take and give*); dan kompromi (*copromise*).

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan peneliti kali ini ialah menggunakan metode penelitian

kualitatif. Bogdan & Taylor (1975) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai upaya aturan dari sebuah penelitian yang menghasilkan berupa Data deskriptif yang dirangkai dengan kata-kata secara tertulis maupun lisan dari perilaku manusia yang diamati dari sebuah fenomena. Lalu Creswell (2013:232) menambahkan bahwa kualitatif merupakan metode-metode untuk memahami sebuah arti kata yang di sampaikan baik secara kelompok maupun secara individu yang di anggap menjadi sebuah masalah kemanusiaan dan masalah sosial pada umumnya. Secara umum kualitatif merupakan sebuah pengetahuan sosial yang bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kaitannya, Kirk & Miller (1986).

Pendekatan studi kasus biasanya digunakan untuk mengeksplorasi masalah (kasus) tertentu (*bounded system*) yang unik dan menarik atau beberapa kasus (*multiple bounded systems*) sekaligus secara mendetail, dengan mengumpulkan data secara langsung dan mendalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, sumber audiovisual, dokumen dan laporan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Creswell, (2007). Penelitian ini akan dieksplorasi secara mendalam dengan menginvestigasi masalah-masalah yang terkait dengan tema penelitian, memahami gejala-gejala yang terkait dengan studi kasus yang akan di bahas dan mengeneralisasinya menjadi sebuah kesimpulan

Data di dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan mengumpulkan data-data sekunder. Wawancara dilakukan dengan apa adanya. Adapun bentuk wawancara

yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan cara menggali secara mendalam informasi dan data yang diperoleh dari informan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari informan akan direkam dan disimpan, setelah itu dibuatkan transkripnya agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu, data juga diperoleh dengan cara mengamati fenomena-fenomena di lapangan yang berhubungan dengan kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan di Desa Mantang Lama. Gejala-gejala yang diperoleh di lapangan akan dicatat dengan menggunakan catatan lapangan.

Subek penelitian peneliti yaitu untuk memahami dan menggungkap kebijakan dan masalah penyediaan kapal tangkap ikan bagi nelayan, maka subjek dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atas kategori-kategori tertentu, yang meliputi; kepala Desa Mantang, Bendahara Desa Mantang Lama, Nelayan di Desa Mantang Lama serta media massa Subjek dalam penelitian ini dan level analisis dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel. 1 Subjek dan Level Analisis

No	Subjek Penelitian	Level Analisis
1	Kepala Desa Mantang yaitu Bapak Zaidi	Untuk mendapat gambaran tentang bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mensejahterakan nelayan yang ada di Desa Mantang Lama
2	Bendahara Desa Mantang	Untuk mendapatkan data primer Anggaran BUMDes di Desa Mantang Lama terkait alokasi anggaran mengenai penyediaan kapal tangkap ikan (pompong)
3	Ketua Kelompok Nelayan Desa	Untuk mendapat gambaran mengenai respon nelayan yang di berdayakan dalam penyediaan kapal tangkap ikan (pompong) bagi

No	Subjek Penelitian	Level Analisis
	Mantang Lama	nelayan ada kebijakan dari pemerintahan desa melalui BUMDes

Sumber : Data Olahan 2018

Kemudian analisis dan interpretasi data peneliti dengan menganalisis formulasi kebijakan terhadap nelayan atas penyediaan kapal tangkap ikan (pompong) di oleh Pemerintahan melalui BUMDes Mantang Lama Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan mengetahui target kebijakan oleh BUMDes Mantang Lama terhadap penyediaan kapal tangkap ikan di Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Penelitian ini melihat mengenai kebijakan pemerintahan desa terhadap nelayan atas penyediaan fasilitas kapal tangkap ikan di daerah pulau sebagai acuan dan pembanding bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah kebijakan penyediaan kapal tangkap ikan demi mensejahterakan perekonomian masyarakat pesisir di daerah pulau pulau kecil. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkompilasi data, memilih dan memilah data, menyusun dan menggabungkan kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data, Yin (2011:177–178).

Data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan akan disusun berdasarkan kategori tertentu, kemudian data-data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis dan dikombinasikan kembali. Selanjutnya data-data tersebut akan diinterpretasikan dengan cara memberi arti terhadap hasil atau temuan penelitian, menemukan signifikansi dari temuan-

temuan tersebut, mengapa temuan tersebut bisa seperti itu, dan menjelaskan hasil-hasil penelitian sesuai dengan konteksnya, Patton (1997:307) Kemudian peneliti mencoba mencari makna atas temuan-temuan tersebut dan memahaminya berdasarkan kondisi objektifnya. Dengan melakukan pemaknaan atas temuan-temuan tersebut diharapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat terjawab secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Nelayan Desa Mantang Lama

Bicara tentang kesejahteraan di desa mantang lama masih belum dapat dikatakan sejahtera (kebutuhan pokok tercukupi). Jika dilihat dari hasil tangkapan nelayan yang dijual kepasar mencapai ratusan ribu perkilo artinya lebih tinggi dibandingkan dijual ke pemborong atau toke sangat relatif murah. Kesehariannya nelayan Desa Mantang Lama memiliki kelompok-kelompok nelayan yang berpergian melaut hingga 3-5 hari untuk memperoleh tangkapan yang besar, 2018 tercatat sebanyak 903 nelayan yang bekerja dengan mengandalkan diri sebagai pekerja dan tidak sebagai bos / usaha milik sendiri.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Nelayan Termiskin di Desa Mantang

No	Nama Lengkap	Pekerjaan
1	Bujang	Nelayan
2	Khaidir	Nelayan
3	Ruslan	Nelayan
4	Amirudin	Nelayan
5	Zulkarnaen	Nelayan
6	Harun	Nelayan
7	Edie Saputra	Nelayan
8	Marzuki	Nelayan

No	Nama Lengkap	Pekerjaan
9	Idris	Nelayan
10	Darwis	Nelayan
11	Rusli	Nelayan
12	Zulkifli	Nelayan
13	Abdul Hamin	Nelayan
14	Jaharudin	Nelayan
15	Rahman	Nelayan
16	Mustofa	Nelayan
17	M. Taurus	Nelayan
18	Alim	Nelayan

Sumber : , Kemiskinan Nelayan Di Desa Mantang Lama, Susanto et.al (2018).

Kepala Desa Mantang Lama menceritakan hal ini harus di ubah atas kebiasaan nelayan yang masih bergantung pada toke, adapula sebanyak 18 nelayan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya. Berangkat dari situ, setelah dilakukanlah sosialisasi terhadap BUMDes dan Kepala Desa Mantang, inisiasi untuk menunjukkan bahwa Desa sangat peduli terhadap nelayan dengan di adakan. Penghasilan nelayan desa mantang lama cukup strategis, informasi yang kami dapatkan dari nelayan yang bekerja dengan memiliki tauke, hasil tangkapan mereka memang di jual dengan harga relatif murah. Hal ini di utarakan oleh kepala Desa Mantang Lama,

“Nelayan kita yang sudah terbiasa memiliki tauke, mereka menjual mahal, bisa dua kali lipat. Contohnya ikan tongkol nelayan kita dengan harga 10ribu perkilo, yang dipasar tauke menjualnya bisa jadi kisaran harga 18-20 ribu setiap kilonya, itu baru hitungan perkilo, bayangkan jika banyak ikan yang dapat berton-ton, seperti kena jajah masyarakat nelayan kami. hal ini membuat keprihatinan saya selaku kepala desa yang bergantung dengan toke untuk penjualannya. Sudah saatnya

mindset masyarakat nelayan kita ubah dan semua itu perlu proses”.

Analisis Kebijakan Pemerintahan Desa Mantang Lama

Kebijakan yang di buat harus melihat dasar hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Desa Mantang Lama bahwasanya kebijakan yang telah di sepakati dengan Nelayan Mantang Lama terdiri atas :

a. Penyediaan Fasilitas

Setelah di wawancara kepala Desa Mantang Lama, peneliti menemukan adanya kebijakan yang di sebut *Material Public Policy* merupakan sebuah kebijakan yang mengatur penyediaan material yang nyata bagi penerima yang di peruntukan bagi nelayan berupa penyediaan fasilitas kapal tangkap ikan. Pada umumnya memberikan keuntungan kepada masyarakat sesuai target sasaran sebuah masalah yang di hadapi. Kepala Desa Mantang menjelaskan untuk Tahap Awal hanya menyediakan 5 Unit Armada Kapal. Adapun sampai saat ini pengerjaan pembuatan kapal sudah memasuki 50% pelaksanaannya. Kepala Desa Matang Lama dalam wawancaranya menjelaskan bahwa ini merupakan suatu kebijakan yang baru untuk mensejahterakan rakyat melalui programnya yang akan di kelola nantinya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Tahap awal 5 Nelayan yang menjadi armada kapal yang di fasilitasi BUMDes melalui Pemerintahan Desa dan juga menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain nantinya tetapi saat ini sudah banyak yang coba-coba mengikuti. Memang sangat sulit untuk mengubah mindset nelayan

agar tidak lagi bergantung pada toke. Saat ini baru satu-satunya di kabupaten hanya desa mantang lama yang menggerakkan para nelayan didesanya untuk tidak bekerja dibawah toke. Tujuan dari adanya ini untuk memisahkan masyarakat dengan toke, karena diyakini bahwa jika nelayan bekerja dengan toke hanya akan merugikan nelayan. Semua mekanisme akan melalui BUMDes” (Wawancara 19 Oktober 2018).

Tabel. 3 Pagu Anggaran Desa Pembuatan Kapal Tangkap Ikan

Item	Target	Anggaran di Alokasikan (Rp)
Pembuatan Dasar + Upah Pembuatan	Desember 2018	160.000.000
Material Bahan Pendukung	Juli 2019	423.400.000,
Total		583.400.000,-

Sumber : Data Bendahara Desa, Alokasi Anggaran ke BUMDes 2018

b. Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Wikipedia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Desa yang mempunyai berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi serta karakter Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BUMDes Desa Mantang Lama pada saat ini hanya memiliki sebuah Akau untuk mengaktifkan masyarakat desa mantang lama untuk memiliki usaha kecil-kecilan yang menjadi ruang diskusi bagi pemuda maupun tokoh yang ada di Desa Mantang Lama. Setelah akau itu terealisasi, selanjutnya pemerintahan Desa Mantang Lama mempunyai program penyediaan kapal tangkap ikan yang dalam proses pelaksanaan. Hal ini pemerintahan desa sangat terfokus pada BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Mantang Lama. Melalui BUMDes pemerintahan desa akan berfokus pada penyediaan kapal tangkap ikan.

c. Target Kebijakan Pemerintah Desa dan Nelayan

Target setelah adanya kebijakan tersebut dari pemerintahan desa melalui BUMDes bisa membangun usaha sendiri dan bisa menjadi tuan rumah sendiri dalam mengelola sumber daya alam. Kesejahteraan ditunjukkan melalui kebijakan dari pemerintahan desa berupa sebuah tabungan bagi nelayan untuk setiap bulannya sebanyak 13 % dari penghasilannya setiap bulan. Kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk ketika ada kendala oleh nelayan berupa kerusakan kapal, maka pihak BUMDes yang bertanggung jawab dengan adaya tabungan tersebut, tidak hanya itu kebijakan kesejahteraan ini

nelayan dimuliakan ketika nelayan butuh pinjaman uang yang bisa di ambil melalui tabungan yang mereka kumpulkan setiap bulan. Bujang, salah satu nelayan yang bersedia atas kebijakan tersebut sangat bahagia jika nelayan di pedulikan, adapun kutipan wawancara yang kami kunjungi di Desa Mantang Lama,

“Saya sama kawan-kawan disini memang setuju setelah di sosialisasikan beberapa bulan yang lalu mengenai BUMDes melalui Pemerintahan Desa untuk menyediakan Kapal Tangkap Ikan ini. Tapi juga banyak yang dari kawan yang sudah memiliki Kapal Sendiri dengan tauke yang punya ikan, tidak berminat dan Pak Kades pun tak memaksa, kami yang 5 orang memang di jadikan percontohan dan kami akan ikut prosedur yang diberikan BUMDes ini hingga kapalnya hingga siap di buat.”

Kebijakan yang telah di sepakati antara pihak BUMDes dan nelayan setelah jadi kapal tangkap ikan, hasil dari tangkapan ikan di bagi sesuai bagi hasil sebesar 20% yang di antaranya 13% untuk pihak BUMDes dan 7% untuk perawatan sub unit kapal ketika terjadi kerusakan dan nelayan tidak perlu ambil pusing akan hal itu. 80 % persnya akan dapat di rasakan oleh nelayan yang di anggap pantas untuk mendapatkan kesejahteraan lebih.

PENUTUP

Peneliti ingin menunjukan bahwa dengan adanya program penyediaan kapal bagi nelayan yang baru dalam masa percobaan ini memberikan contoh sebuah kebijakan alternatif untuk mensejahterakan

masyarakat di daerah pesisir maupun pulau-pulau kecil yang harus merasakan program dari pemerintah desa yang bermanfaat. Peneliti juga menemukan bahwa program ini hanya satu desa yang di jalan kan yang ada di kabupaten bintan, tidak terlepas dari itu kedepannya pihak pemerintahan desa melalui BUMDes harus memformulasikan kebijakan yang memang menjadi kebutuhan rakyat dan tepat sasaran, dalam studi nelayan ini hanya ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam arti menjadi bos atas ikan-ikan di jual dengan kerjasama oleh Pemerintah Desa melalui BUMDes. Hal ini sering terjadi di beberapa Desa di Indonesia banyak program yang tidak terealisasi dengan tidak memperhatikan kultur budaya dan tradisi yang menjadi faktor lingkungan yang kurang mendukung. Peneliti juga menyatakan BUMDes di Desa Mantang sangat penting bagi masyarakat mantang lama agar menjadi desa yang produktif dan sejahtera di bidang kelautan dan perikanan.

Saran dari peneliti pihak BUMDes harus membuat kebijakan baru seperti ketika kapal tangkap ikan sudah beroperasi, maka perlu adanya gudang untuk menampung ikan tersebut serta pihak BUMDes harus mencari relasi serta mempromosi hasil tangkapan ikannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengingat posisi Desa Mantang mempunyai letak strategis dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Kepada peneliti selanjutnya di harapkan bisa mengevaluasi atas implementasi kebijakan yang dilaksanakan BUMDes, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat mengkaji atas penyediaan kapal tangkap ikan di desa lainnya jika ada serta melihat

kebijakan-kebijakan yang di kembangkan oleh desa melalui BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2000). *Public Policy Making : an Introduction* (4th ed.). Boston.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research*. New York.
- Crissman, C. C., Antle, J. M., & Capalbo, S. M. (1998). *Economic, Environmental, and Health Trade offs in Agriculture : Pesticides and The Sustainability of Andean Potato Production*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2000). *Public Policy Analysis : an Introduction* (Fifth). New York: Routledge.
- Friedrich, C. J. (1940). Public Policy and The Nature of Administrative Responsibility. *Public Policy*, 1, 1–20.
- Kirk, J., & Miller, M. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Kismartini. (2010). Analisis Trade-Off Sebagai Alat Analisis Kebijakan Publik. "Dialogue " *Jurnal Ilmu Administrasi Kebijakan Publik (JIAKP)*, 1(3), 402–416.
- Landis, P. H. (1936). Farmers and Villagers on Relief. *Rural Sociology Research Laboratory*.
- Ma, L. . (2013). Project Based Poverty Alleviation in Rural Areas and its Limitations. *Social Science Front*, 211–217.
- Marbun, A. C. S., Kusai, & Zulkarnain. (2018). Strategi Tauke dalam Mempertahankan Hubungan Kerjasama dengan Nelayan di Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. *Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau*, 2, 227–249
- Moeljadi. (2017). *Desa Sebagai Garda Pertahanan Negara*. Jakarta: Lokakarya Dirjen Pembinaan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Patton, M. Q. (1997). *Utilization Focused Evaluation: The New Century Text*. Sage Publications.
- Quade, E. S. (1982). *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishing.
- Rahim, A., Ramli, A., & Hastuti, D. R. D. (2014). *Ekonomi Nelayan Pesisir Dengan Permodelan Ekonometrika*. Makassar: Pusat Kegiatan belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa; Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), 1689–1699.
- Ridlwani, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Roe, E. (1994). *Narrative Policy Analysis : Theory and Practice*. Duke University Press.
- Setiawan, R. (2017). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. (T. Samnuzulsari, Ed.). Tanjungpinang: Umrahpress.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik (JKAP)*, 19(2), 115–131.
- Springate, O., Baginski, & Soussan, J.

- (2002). A Methodology for Policy Process Analysis. *Policy Relationship in Sounth Asia*, 19.
- Supriyanto, Adiputra, Y. S., & Nazaki. (2015). Evaluasi Program Tenaga Kerja Sarjana di Desa Mantang Lama Kabupaten Bintan. *Repository UMRAH*, (3), 1–18.
- Susanto, G., Wahyuni, S., & Rahmawati, N. (2018). Kemiskinan Nelayan di Desa Mantang Lama. *Repository UMRAH*, 14.
- Usman, S. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2011). *Policy Analysis: Concepts and Practice* (Sixth). London: Routledge.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*.

Internet

- Badan Usaha Milik Desa* (n.d.). Diperoleh pada Desember 2, 2018, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa
- Definisi Tauke* (n.d.). Diperoleh pada November 13, 2019, dari <https://kbbi.web.id/tauke>